

ABSTRAK

MAYA ANGGRAINI, NPM: 2022080, Judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.” Di bawah bimbingan **Bapak Muhammad Arsyad, S.Pd.I., M.AP**, sebagai Pembimbing I dan **Bapak Mohammad Fajar Noorahman, M.Psi. M.A**, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilandasi dengan latar belakang bahwa kurang optimalnya sosialisasi terkait dengan peraturan yang melarang pedagang kaki lima di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat, kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat, keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 13 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data adalah Perpanjangan pengamatan, Meningkatkan ketekunan, Triangulasi, Menggunakan bahan referensi, Mengadakan *membercheck*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang belum optimal. Pada variabel komunikasi, indikator transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi belum optimal karena penyampaian informasi mengenai penertiban dan relokasi belum dipahami secara merata oleh pedagang. Pada variabel sumber daya, indikator sumber daya manusia dan kewenangan petugas belum optimal akibat keterbatasan jumlah personel, belum tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sedangkan indikator kepatuhan petugas dan fasilitas tergolong cukup optimal meskipun pengawasan serta sarana pendukung masih perlu ditingkatkan. Pada variabel disposisi, indikator sikap pelaksana, kemampuan petugas, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum optimal, sedangkan indikator insentif cukup optimal karena petugas tetap melaksanakan tugas meskipun tidak memperoleh insentif khusus. Pada variabel struktur birokrasi, indikator fragmentasi atau pembagian wewenang belum optimal karena koordinasi antarinstansi belum berjalan maksimal. Faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi koordinasi antarinstansi, adanya dasar hukum dan prosedur penertiban sebagai faktor pendukung, serta kurang optimalnya penyampaian informasi, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya PPNS, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya kepatuhan pedagang kaki lima sebagai faktor penghambat.

Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana penertiban. Satpol PP agar meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi. Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan agar meningkatkan penataan lokasi relokasi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima agar mematuhi ketentuan yang berlaku, dan masyarakat mendukung pelaksanaan penertiban guna mewujudkan ketertiban umum secara optimal.

ABSTRACT

Maya Anggraini, NPM: 2022080, with the thesis entitled **"Implementation of Hulu Sungai Tengah Regency Regional Regulation Number 06 of 2024 on the Control of Street Vendors on the Sidewalk of Pantai Hambawang Terminal"** under the supervision of Mr. **Muhammad Arsyad, S.Pd.I., M.AP**, as First Supervisor and Mr. **Mohammad Fajar Noorahman, M.Psi. M.A**, as Second Supervisor.

This research was motivated by the inadequate dissemination of information regarding the regulation prohibiting street vendors from trading on the sidewalks of Pantai Hambawang Terminal, the lack of supervision over street vendors operating in the area, and the limited human resources available for enforcement activities. The study aimed to analyze the implementation of Hulu Sungai Tengah Regency Regional Regulation Number 06 of 2024 concerning the control of street vendors on the sidewalks of Pantai Hambawang Terminal and to identify the factors influencing its implementation.

This study employed a qualitative approach with a descriptive qualitative research design. Informants were selected using purposive sampling, involving 13 informants. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data credibility was ensured through prolonged engagement, increased persistence, triangulation, the use of reference materials, and member checking.

The findings indicate that the implementation of Hulu Sungai Tengah Regency Regional Regulation Number 06 of 2024 concerning the control of street vendors on the sidewalks of Pantai Hambawang Terminal has not been optimal. In the communication variable, the indicators of transmission, clarity of information, and consistency of information were found to be inadequate because information regarding enforcement and relocation had not been evenly understood by all street vendors. In the resources variable, the indicators of human resources and authority were not optimal due to the limited number of personnel and the absence of Civil Service Investigators (PPNS), while the indicators of officers' compliance and facilities were considered fairly optimal, although supervision and supporting facilities still require improvement. In the disposition variable, the indicators of implementers' attitudes and officers' capabilities were not optimal, whereas the incentive indicator was considered fairly optimal because officers continued to perform their duties despite receiving no special incentives. In the bureaucratic structure variable, the fragmentation or division of authority indicator was not optimal because inter-agency coordination had not yet functioned effectively. The factors influencing implementation include inter-agency coordination and the existence of a legal framework and enforcement procedures as supporting factors, while uneven information dissemination, limited human resources, the absence of Civil Service Investigators (PPNS), limited facilities, and the low level of compliance among street vendors were identified as inhibiting factors.

It is recommended that the Hulu Sungai Tengah Regency Government improve the availability of human resources and supporting facilities for enforcement activities. The Municipal Police (Satpol PP) should strengthen socialization, supervision, and coordination. The Department of Trade and the Department of Transportation should improve the arrangement of relocation areas for street vendors. Street vendors are expected to comply with the applicable regulations, while the community is encouraged to support enforcement efforts in order to achieve public order effectively.